

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan meliputi: *size*, kewajiban, umur, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), status daerah, lokasi pemerintahan daerah, jumlah anggota DPRD, *intergovernmental revenue*, tingkat kemandirian, dan kemakmuran daerah. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam LKPD yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dari 467 Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, hanya 76 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia adalah 54.14%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya taat terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah, status daerah, *intergovernmental revenue*, tingkat kemandirian keuangan, dan kemakmuran berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan untuk pemerintah, khususnya para pembuat kebijakan dan peraturan. Implikasinya, pemerintah daerah harus meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib terhadap SAP, serta perlu adanya sistem *reward* terkait dengan kepatuhan pengungkapan wajib.

Kata kunci: pengungkapan wajib, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik pemerintah daerah.

*THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT
CHARACTERISTICS ON THE LEVEL MANDATORY DISCLOSURE
OF FINANCIAL STATEMENTS
(An Empirical Study of Indonesian Municipalities)*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of local characteristics on the level of mandatory disclosure of financial statements. Local government Characteristics are identified as size, duty, age, the number of regional pariperal set of job (SKPD), the status of local government, location of local government, the number of parliament members, intergovernmental revenue, level of independence, and prosperity of the region. This study focuses on the mandatory disclosure compliance of balance sheet in Government Accounting Standards (SAP). Of the 467 Local Governments in Indonesia, only 76 samples can be used in this study. Results Descriptive statistics showed that the mean mandatory disclosure of local government in Indonesia is 54.14%. This indicates that local governments are not fully obedient to the Government Accounting Standards. The results of regression analysis showed that the age of the regional government, regional status, intergovernmental revenue, the level of financial independence, and prosperity affect the level of mandatory disclosure in the financial statmet. The results are expected to be used as an evaluation and feedback to the government, especially policy makers and regulatory. The implication, local governments should increase the level of compliance with mandatory disclosure to the SAP, as well as the need for reward system linked to compliancewithmandatorydisclosure.

Key words: mandatory disclosure, the Governmental Accounting Standards (SAP), the characteristics of local government.